

# EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS

**Mujiono**

Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis  
Politeknik Negeri Bengkalis  
Jl. Bathin Alam, Sei. Alam, Bengkalis-Riau Kode Pos 28715  
Telp. (0766) 7008877; 0812 759 9804 Fax (0766) 8001000  
Email: mujiono\_2476@yahoo.com

**Abstract:** *The existence of microfinance institutions in rural areas plays strategic roles to boost the community socioeconomic development. Microfinance Institution of Rural Economic Enterprises- Savings and Loans (LKM UED-SP) of Bengkalis Regency, until 2016, has been able to develop both cumulative and current year loans volume. The development has also occurred on the poor household loans which continuously increasing every year. The numbers of debtors according to genders have shown a positive development. The average of male debtors were 28,283 people with the ratio average of 66.20% , female debtors were 14, 517 people with the ratio average of 33.80%. In addition, 538 of the debtors were from poor families with the ratio average of 1.28%. Among the business sectors, the debtors including several sectors such as trading, agriculture, plantation, fishery, animal husbandry, small industries and services: with the highest sectors nominated by plantation of 51.96%, trading of 30.77% and service sector of 6.28% - while the other sectors were below 5%. The government capital ratio was in average of 93.72% and from the current year profit of 6.28%. The number of female staff developed in average of 204 people each year. The development on productive business loans was in average of 57.72% and poor household loans of about 32.79%. The staff's productivity was about 105 people per staff with the average loan volume of Rp. 1.344.881.683,-. The average of staff's incentive reached Rp. 1.173.720.029,- with the ratio of Rp. 2.558.789,- per staff.*

**Keywords:** *Micro Finance and Social Performance*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga jasa layanan keuangan tabungan dan kredit (simpan-pinjam) dana segar dalam skala mikro, biasanya memiliki pangsa pasar para pengusaha kecil serta besaran kredit yang dikucurkan juga relatif kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro

kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari definisi diatas jelas bahwa kegiatan usaha LKM fokus pada pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa keberadaan LKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat kecil yang secara umum berada diwilayah pedesaan.

LKM tentunya akan berdekatan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena LKM merupakan lembaga pembiayaan dari UMKM. Pengembangan UMKM merupakan cara jitu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan. Hasil penelitian supriyanto (2006) penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2005), jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap lebih kurang 99,45% lapangan kerja dari total sekitar 76,54 juta pekerja (Krisna Wijaya, dalam Supriyanto,2006 ).

Fakta diatas menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang sosial ekonomi dapat ditempuh dengan mengembangkan UMKM melalui pemberian dan penyediaan modal dari LKM.

Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya ekonomi desa,

Pada Tahun 2005 Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang *Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Desa (PPD)*.

PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa (DUD), memperkuat kelembagaan desa/kelurahan, dan meningkatkan peran aktif instansi sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat desa/kelurahan, serta mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif (dalam Bambang Supeno dan Mujiono, 2015).

Pemberian DUD yang diawali pemerintah provinsi kemudian diikuti oleh pemerintah kota dan kabupaten yang ada di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mengucurkan DUD lebih dari 500 miliar rupiah dengan jumlah LKM dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebanyak 155 unit hingga oktober 2016.

Kondisi pedesaan diwilayah Kabupaten Bengkalis saat ini pada umumnya sudah memiliki infra struktur yang memadai, namun tanpa bantuan dan program ekonomi yang dapat menyentuh langsung kehidupan sosial ekonomi masyarakat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat desa akan sulit diwujudkan. Hasil pengamatan dilapangan sebelum adanya program ini bahwa rata-rata diwilayah pedesaan kabupaten bengkalis masih sangat sulit mencari kebutuhan dana sebagai modal kerja, wirausaha wanita sangat sedikit, pertumbuhan ekonomi desa relatif kecil, pola pinjaman rakyat miskin tidak ada, lapangan kerja terbatas dan minim, teknologi untuk usaha rendah

dan tertinggal dan peredaran uang juga kecil.

Keberadaan 155 unit LKM dalam bentuk UED-SP di Kabupaten Bengkalis diharapkan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, munculnya beragam usaha kecil dari berbagai sektor, naiknya peredaran jumlah uang di pedesaan, terbantunya masyarakat miskin, pemberdayaan perempuan di sektor usaha. Intinya bahwa geliat ekonomi kerakyatan terkena dampaknya.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tujuan, aktivitas sistem internal dan pencapaian misi sosial UED-SP yang ada di Kabupaten Bengkalis hingga Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian penulis sebelumnya yakni:

1. Penelitian Mujiono dan Halim Dwi Putra (2013) dengan judul "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kabupaten Bengkalis".
2. Penelitian Bambang Supeno dan Mujiono (2015) dengan judul "Pengaruh Modal Manusia dan Modal Pelanggan Terhadap Kinerja Bisnis Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Provinsi Riau)".
3. Penelitian mujiono (2016) dengan judul "Implementasi Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Bengkalis"

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis pada bulan juli sampai dengan oktober 2016. Data diambil dari

laporan keuangan tahunan seluruh LKM UED-SP yang ada di kabupaten Bengkalis sebanyak 155 unit. Laporan keuangan yang diambil merupakan akumulasi dari mulai berdirinya masing-masing LKM UED-SP hingga oktober 2016.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kinerja Sosial (*Social Performance*) Analisis Kinerja Sosial diadopsi dari *MIX market social performance standards report* (2009). Jumlah standar dan indikator disesuaikan dengan ketersediaan data dari laporan yang ada.

Analisis kinerja sosial dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan, sistem dan strategi, kebijakan dan kepatuhan, dan output dan outcome yang dicapai pada operasionalisasi LKM UED-SP di Kabupaten Bengkalis Aspek-aspek yang dilihat yakni:

1. Perkembangan perguliran volume pinjaman
2. Perkembangan perguliran pinjaman dan volume pinjaman menurut sektor usaha
3. Perkembangan peminjam dan volume pinjaman rumah tangga miskin
4. Perkembangan jumlah peminjam berdasarkan jenis kelamin
5. Perkembangan sumber modal LKM UED-SP
6. Perkembangan jumlah penabung dan volume tabungan
7. Perkembangan jenis-jenis produk dan layanan
8. Produktivitas staff terhadap jumlah peminjam dan volume pinjaman
9. Produktivitas staf terhadap penabung dan volume tabungan
10. Rasio insentif
11. Jumlah dan jenis pelatihan yang berhubungan dengan manajemen kinerja sosial

12. Jumlah staf yang mengikuti pelatihan manajemen kinerja social
13. Rasio jumlah peminjam perempuan
14. Rasio jumlah seluruh peminjam berdasarkan sektor usaha
15. Rasio jumlah peminjam miskin
16. Rasio Jumlah penabung dan volume tabungan
17. Rasio pemanfaat kredit aneka guna

### DASAR TEORI

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*” (Kompas, 15 Maret 2005). Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB) dalam Ardito Bhinadi (2008), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran ber-

bagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their micro-enterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dalam Saparila Worokinasih (2011) dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia dalam Gunawan (2007) menyatakan bahwa ciri utama dan pola LKM di Indonesia, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat

2. Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan

Dan pola-pola Lembaga keuangan mikro di Indonesia adalah:

1. *Saving ledd microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (membership based). Dalam pola ini, pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro. Contohnya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan Koperasi Simpan Pinjam.
2. *Credit Ledd Microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank.
3. *Micro Banking*, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam
4. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat

Sangat jelas bahwa melalui LKM geliat ekonomi masyarakat, terutama wilayah pedesaan akan dapat lebih berkembang karena adanya peran positif dari LKM ini. UMKM yang ada di wilayah desa sudah barang tentu akan membutuhkan sentuhan-sentuhan modal dari LKM. Untuk itu supaya UMKM di wilayah pedesaan bisa

hidup dan berkembang maka pemerintah melalui Dirjen PMD mencetuskan program LKM dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Permendagri nomor 6 Tahun 1998 usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa UED-SP dibentuk melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan. Keputusan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan UED-SP berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikota/Walikota KDH.Tk. II. UED-SP berkedudukan di desa/kelurahan.

Unit Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) bertujuan untuk:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa /kelurahan.
2. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/ kelurahan.
4. Menghindarkan anggota masyarakat desa/ kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat desa/ kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerin-

tahan dan atau sumber-sumber lain yang sah.

6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Sasaran UED-SP yaitu masyarakat yang berada di desa/kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya. Kegiatan UED-SP antara lain:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/kelurahan yang dinilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/kelurahan sebagai anggota UED-SP.
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Dengan demikian jelas bahwa LKM UED-SP merupakan organisasi bisnis yang berbentuk LKM, berorientasi pada profit/keuntungan dan bukan merupakan organisasi sosial semata. Meskipun dengan memberikan pinjaman yang relatif kecil dengan suku bunga yang terjangkau oleh masyarakat desa khususnya.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji masalah ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pieter Perdana T, Ahmad Rifai, Didi Muwardi (2014). Menyimpulkan bahwa volume pinjaman kumulatif semakin meningkat (dengan rata-

rata pinjaman sebesar Rp.2.134.484.121,-), volume pinjaman tahun berjalan rata-rata Rp. 743.061.650,-, Sumber modal LKM UED-SP terus meningkat baik dari tabungan masyarakat maupun pinjaman dari luar, volume pinjaman per sektor usaha berfluktuatif dan tetap menuju tren yang positif, partisipasi peminjam miskin masih minim hanya 3 (tiga) orang dengan volume pinjaman Rp. 16.036.733,-. Dan dari sisi analisis keuangan rasio perlindungan sangat jauh dari ideal, rasio struktur keuangan efektif tidak ideal, rasio kualitas aset pada perhitungan rasio *Net Performing Loan* (NPL) berada pada kondisi ideal dan rasio tingkat dan pendapatan bersih dalam kondisi ideal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Retno Sari, Ahmad Rifai, Didi Muwardi (2014). Menyimpulkan bahwa LKM UED-SP di Kecamatan Pangkalan Lesung yang berada di Desa Sari Makmur dan Desa Rawang Sari Keduanya telah berusaha mencapai misi dan tujuan sosial, melalui peningkatan perguliran pinjaman, perkembangan peminjam, perkembangan volume pinjaman, jangkauan terhadap rumah tangga miskin, peningkatan jumlah peminjam perempuan, dan peningkatan jangkauan peminjam sektor usaha produktif, Kinerja keuangan LKM UED-SP di Kecamatan Pangkalan Lesung berada pada kondisi yang sehat dari 17 rasio yang dipergunakan dalam pengukuran hanya 3 rasio yang tidak ideal yaitu rasio perlindungan dan rasio likuiditas.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Kurniawan Rasmi, Ahmad Rifai, Ermi Tety (2015). Menyimpulkan bahwa Dimensi aktivitas dan sistem internal yaitu sistem dan strategi mengalami perkembangan

ditunjukkan oleh indikator produktivitas staf terhadap jumlah peminjam dan volume pinjaman serta peningkatan rasio insentif staf. Dimensi aktivitas dan sistem internal dalam kebijakan dan kepatuhan mengalami perkembangan ditunjukkan oleh indikator tanggung jawab sosial terhadap staf yang pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan manajemen kinerja sosial. Produktivitas staf terhadap jumlah peminjam cenderung stagnan dikarenakan kemampuan staf dalam menarik pinjaman kurang efektif ini disebabkan terjadinya tunggakan oleh peminjam. Dari 17 rasio PEARLS yang dianalisis 8 diantaranya berada pada kondisi ideal. Rasio perlindungan menjadi titik lemah bagi UED-SP Bina Sejahtera karena tidak memiliki cadangan resiko jika terjadi kelalaian pinjaman, begitu juga rasio pinjaman beredar yang tidak dalam kondisi ideal karena dibiayai oleh piutang yang terlalu tinggi.

4. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah; penelitian ini menggunakan data makro berupa seluruh usaha ekonomi desa simpan pinjam yang ada di Kabupaten Bengkalis sementara penelitian sebelumnya hanya beberapa UED-SP.

## PEMBAHASAN

Hingga Oktober 2016 jumlah LKM UED-SP yang ada di Kabupaten Bengkalis 155 unit dengan penyebaran:

1. Kecamatan Bengkalis sebanyak 31 unit
2. Kecamatan Bantan sebanyak 23 unit
3. Kecamatan Bukit Batu sebanyak 17 unit
4. Kecamatan Siak Kecil sebanyak 17 unit
5. Kecamatan mandau sebanyak 24 unit
6. Kecamatan Pinggir sebanyak 19 unit
7. Kecamatan Rupert sebanyak 16 unit
8. Kecamatan Rupert Utara sebanyak 8 unit

Kinerja sosial dari LKM UED-SP yang ada di Kabupaten Bengkalis dilihat dari tiga indikator yakni:

1. Tujuan LKM,
2. Aktivitas & sistem internal dan
3. Pencapaian misi sosial (output dan outcome)

Dengan memperhatikan beberapa aspek dari masing-masing indikator sesuai dengan ketersediaan data dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.



**Tabel 1. Perkembangan Beberapa Aspek *Social Performance* Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (LKM UED-SP) Kabupaten Bengkalis Hingga Oktober 2016**

Aspek	Tahun					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016*	
<b>1. Perkembangan Volume Pinjaman Kumulatif dan Volume Pinjaman Tahun Berjalan</b>						
Volume Pinjaman Kumulatif (Rp.)	170.166.000.000	272.215.142.000	476.406.434.000	764.964.588.000	1.035.249.168.000	543.800.266.400
Perkembangan Volume Pinjaman Tahun Berjalan (Rp.)	161.368.800.000	200.077.600.000	289.041.930.000	391.934.399.000	527.034.280.000	313.891.401.800
<b>2. Perkembangan Peminjam dan Volume Pinjaman Menurut Sektor</b>						
<b>Perkembangan Peminjam</b>						
Usaha Sektor Perdagangan (orang)	5.526	7.894	12.242	17.677	22.336	13.135
Usaha Sektor Pertanian (orang)	467	688	964	1.297	1.594	1.002
Usaha Sektor Perkebunan (orang)	7.767	12.259	20.580	30.534	40.299	22.288
Usaha Sektor Perikanan (orang)	623	911	1.388	1.907	2.645	1.495
Usaha Sektor Peternakan (orang)	417	578	828	1.192	1.610	925
Usaha Sektor industri Kecil (orang)	591	813	1.183	1.596	2.054	1.247
Usaha Sektor Jasa (orang)	1.118	1.558	2.449	3.631	4.788	2.709
Jumlah	16.509	24.701	39.634	57.834	75.326	42.800
<b>Perkembangan Volume Pinjaman</b>						
Usaha Sektor Perdagangan (Rp.)	54.869.160.000	86.026.514.000	147.491.119.000	236.494.059.000	311.398.039.000	167.255.778.200
Usaha Sektor Pertanian (Rp.)	3.525.000.000	5.836.000.000	8.938.500.000	12.858.700.000	16.077.700.000	9.447.180.000
Usaha Sektor Perkebunan (Rp.)	85.597.340.000	141.274.969.000	255.035.004.000	415.104.599.000	568.931.099.000	293.188.602.200
Usaha Sektor Perikanan (Rp.)	4.942.000.000	7.715.888.000	13.192.671.000	20.220.228.000	28.616.728.000	14.937.503.000
Usaha Sektor Peternakan (Rp.)	3.971.000.000	5.798.000.000	8.746.640.000	13.598.516.000	18.917.516.000	10.206.334.400
Usaha Sektor industri Kecil (Rp.)	5.412.000.000	8.142.811.000	12.671.633.000	18.118.075.000	24.052.075.000	13.679.318.800
Usaha Sektor Jasa (Rp.)	11.849.500.000	17.420.960.000	30.330.867.000	48.570.411.000	67.256.011.000	35.085.549.800
Jumlah	170.166.000.000	272.215.142.000	476.406.434.000	764.964.588.000	1.035.249.168.000	543.800.266.400
<b>3. Perkembangan Peminjam dan Volume Pinjaman Rumah Tangga Miskin</b>						
Perkembangan Peminjam Rumah Tangga Miskin	330	395	515	694	753	538
Perkembangan Volume Pinjaman Rumah Tangga Miskin	1.701.660.000	2.177.721.136	3.096.641.821	4.589.787.528	5.176.245.840	3.348.411.265
<b>4. Perkembangan Jumlah Peminjam Menurut Gender</b>						
Laki-laki (orang)	11.395	16.689	26.399	37.932	49.001	28.283
Perempuan (orang)	5.114	8.012	13.235	19.902	26.323	14.517
Jumlah	16.509	24.701	39.634	57.834	75.324	42.800

Lanjutan Tabel 1

Aspek		Tahun					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016*	
<b>5.</b>	<b>Perkembangan Sumber Modal</b>						
	Pemerintah (Rp.)	204.000.000.000	101.000.000.000	102.000.000.000	102.000.000.000	155.000.000.000	132.800.000.000
	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	2.407.489.595	6.831.495.210	8.576.459.552	9.297.907.439	13.066.903.897	8.036.051.139
	Jumlah Modal	206.407.489.595	107.831.495.210	110.576.459.552	111.297.907.439	168.066.903.897	140.836.051.139
<b>6.</b>	<b>Rasio Jumlah Modal Menurut Sumber modal</b>						
	Rasio Modal Pemerintah (%)	98,83	93,66	92,24	91,65	92,23	93,72
	Rasio Modal dari Laba Tahun Berjalan (%)	1,17	6,34	7,76	8,35	7,77	6,28
<b>7.</b>	<b>Perkembangan Jumlah Staff (orang)</b>						
	Laki-laki	221	227	227	223	335	247
	Perempuan	187	181	181	185	285	204
	Jumlah	408	408	408	408	620	450
<b>8.</b>	<b>Perkembangan Produk Keuangan</b>						
	Pinjaman Usaha Produktif (%)		59,97	75,01	60,57	35,33	57,72
	Pinjaman Produk Rumah Tangga Miskin (%)		27,98	42,20	48,22	12,78	32,79
<b>9.</b>	<b>Pengembangan Produk Jasa, Kinerja staff dan Insentif Staff</b>						
a.	<b>Produktifitas Staff terhadap Jumlah Peminjam dan Volume Pinjaman</b>						
	Produktifitas terhadap Peminjam (org/staff)	40	61	97	142	121	105
	Produktifitas terhadap Volume Pinjaman (Rp/staff)	417.073.529,41	667.193.975,49	1.167.662.828,43	1.874.913.205,88	1.669.756.722,58	1.344.881.683
b.	<b>Rasio Insentif</b>						
	Insentif staff (Rp.)	545.521.401	719.314.405	1.005.588.709	1.452.332.200	1.517.644.800	1.173.720.029
	Rasio Insentif Terhadap Jumlah Staff (Rp/staff)	1.337.062	1.763.026	2.464.678	3.559.638	2.447.814	2.558.789

Lanjutan Tabel 1

Aspek		Tahun					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016*	
<b>10.</b>	<b>Jangkauan Layanan Menurut Gender</b>						
a.	Rasio Peminjam Laki-laki (%)	69,02	67,56	66,61	65,59	65,05	66,20
b.	Rasio Peminjam Perempuan (%)	30,98	32,44	33,39	34,41	34,95	33,80
<b>11.</b>	<b>Jangkauan Layanan Nasabah</b>						
<b>a.</b>	<b>Rasio Jumlah Seluruh Peminjam Menurut Sektor Usaha</b>						
	Usaha Sektor Perdagangan (%)	33,47	31,96	30,89	30,57	29,65	30,77
	Usaha Sektor Pertanian (%)	2,83	2,79	2,43	2,24	2,12	2,39
	Usaha Sektor Perkebunan (%)	47,05	49,63	51,93	52,80	53,50	51,96
	Usaha Sektor Perikanan (%)	3,77	3,69	3,50	3,30	3,51	3,50
	Usaha Sektor Peternakan (%)	2,53	2,34	2,09	2,06	2,14	2,16
	Usaha Sektor industri Kecil (%)	3,58	3,29	2,98	2,76	2,73	2,94
	Usaha Sektor Jasa (%)	6,77	6,31	6,18	6,28	6,36	6,28
<b>b.</b>	<b>Rasio Jumlah Peminjam Rumah Tangga Miskin (%)</b>	2,00	1,60	1,30	1,20	1,00	1,28

Sumber: BPMPD Kabupaten Bengkalis 2016

\*Tahun 2016 data sampai dengan 31 oktober

### **Tujuan LKM UED-SP**

Tujuan LKM UED-SP di Kabupaten Bengkalis dilihat dari perkembangan volume pinjaman kumulatif tahun 2012 hingga oktober 2016 memiliki rata-rata sebesar Rp.543.800.266.400,-. Sementara perkembangan volume pinjaman tahun berjalan yang digulirkan rata-rata Rp. 313.891.401.800,-. Fakta ini mengindikasikan bahwa perkembangan pinjaman kumulatif dan volume pinjaman tahun berjalan berfluktuatif. Fluktuasinya rata-rata 57,72%. Namun pada tahun 2015 dan 2016 justru mengalami penurunan hal ini karena penambahan jumlah LKM UED-SP sebanyak 53 unit sehingga berkemungkinan belum mampu bekerja maksimal.

Dari sisi jangkauan sektor yang didanai LKM UED-SP di Kabupaten Bengkalis melayani sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. Sektor perkebunan merupakan angka terbesar dengan nilai rata-rata Rp. 293.188.602.200,- atau sebesar 53,91% dan sektor perdagangan dengan nilai rata-rata Rp. 167.255.778.200 atau 30,76% dan sektor lainnya hanya dibawah 10%. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa secara geografis bahwa bengkalis merupakan wilayah pengembangan perkebunan karet, kelapa sawit, kelapa, sagu dan lainnya. Selain itu sektor perdagangan juga menjadi potensi andalan masyarakat Bengkalis terutama perdagangan kecil dan menengah.

Dari sisi jumlah peminjam hingga oktober 2016 LKM UED-SP mampu melayani 42.800 orang masyarakat Kabupaten Bengkalis. Sektor perkebunan juga mendominasi dengan jumlah

22.288 orang atau 51,96%. Kemudian sektor perdagangan sebanyak 13.135 orang atau 30,77%. Sementara sektor lainnya masih dibawah 10%. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis mampu memberdayakan ekonomi masyarakatnya di berbagai sektor usaha.

Dilihat dari sisi perkembangan peminjam rumah tangga miskin sampai dengan oktober 2016 rata-ratanya sebanyak 538 orang dengan rasio 1,26% setiap tahunnya. Dari sisi jumlah pinjaman rumah tangga miskin rata-rata sebesar Rp. 3.348.411.265,-. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada rumah tangga miskin, hal ini karena pinjaman ini tanpa disertai dengan barang jaminan.

Dari sisi *gender* peminjam LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis memiliki kecenderungan naik baik peminjam laki-laki maupun perempuan. Rata-rata peminjam perempuan hingga oktober 2016 sebanyak 28.283 dengan rata - rata rasio 66,20% dan peminjam perempuan sebanyak 14.517 dengan rata-rata rasio 33,80%. LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis memberikan kesempatan yang sama ke semua *gender* untuk menjadi pelaku usaha. Jumlah peminjam perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya bahwa pengelola LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis mampu memberikan stimulus kepada kaum wanita untuk berperan aktif dalam memanfaatkan pinjaman untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Selain itu ini membuktikan bahwa perempuan di wilayah pedesaan juga mampu mela-

kukan usaha dalam rangka menopang ekonomi rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggungjawab penuh suaminya sebagai kepala rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari indikator tujuan, LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis sudah memberikan andil yang besar terhadap permasalahan permodalan bagi masyarakat pedesaan dalam berusaha, sehingga tercipta lapangan kerja yang baru, produktivitas masyarakat desa meningkat dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rudjito (2008) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk :

1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
3. Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi.
4. Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

Keberadaan LKM UED-SP mampu menyentuh permasalahan sosial ekonomi masyarakat desa di wilayah Kabupaten Bengkalis terutama golongan masyarakat miskin. Hal ini dibuktikan dengan adanya pinjaman modal bagi kelompok miskin meskipun hingga saat ini masih tidak lebih dari 1% dari total perguliran dana.

Diharapkan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat miskin mampu mendorong program pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Perkembangan sumber modal LKM UED-SP hingga oktober 2016 masih didominasi oleh modal dari pemerintah daerah dengan rata-rata Rp. 132.800.000.000,- atau dengan rasio sebesar 93,72%. Sementara modal dari laba tahun berjalan rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.8.036.051.139,- atau dengan rasio sebesar 6,28%. Artinya bahwa LKM UED-SP di Kabupaten Bengkalis permodalannya masih dibiayai sepenuhnya dari APBD Kabupaten Bengkalis. Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari laba operasionalnya.

Upaya lain untuk memperoleh modal kerja berupa dana segar dari tabungan masyarakat, perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga masih belum dilakukan. Sudah semestinya LKM UED-SP atas persetujuan Pemerintah Daerah sudah menggalakkan program ini.

Perkembangan jumlah staff pengelola LKM UED-SP di Kabupaten Bengkalis cenderung tetap karena pihak PEMDA Bengkalis menetapkan bahwa pengelola hanya dibatasi 4 orang setiap LKM UED-SP. Namun jika dilihat dari sisi *gender*, perkembangan staff juga berfluktuatif meskipun perubahannya tidak terlalu besar. Rata-rata perkembangan staff laki-laki sebanyak 247 orang dan staff perempuan sebanyak 204 tiap tahunnya. Artinya bahwa dari sisi sosial bahwa LKM UED-SP di Kabupaten Bengkalis memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi staff atau pengelola tanpa memandang *gender*.

### **Aktifitas dan Sistem Internal**

Produk keuangan yang ada di LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis hanya ada 2 yakni pinjaman usaha produktif dan pinjaman rumah tangga miskin. Perkembangan pinjaman produktif mulai dari tahun 2013 hingga oktober 2016 berfluktuasi. Tahun 2013 sebesar 59,97% tahun 2014 75,01% tahun 2015 60,57% dan tahun 2016 samapi bulan oktober 35,33% dengan nilai rata-rata 57,72%. Perkembangannya cukup baik hingga tahun 2014 dengan kecenderungan naik. Namun mulai tahun 2015 dan 2016 justru mengalami penurunan. Ini perlu disikapi oleh pengelola faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya.

Perkembangan jumlah pinjaman penduduk miskin tahun 2013 berkembang sebesar 27,98% tahun 2014 berkembang 42,20% tahun 2015 berkembang 48,22% dan tahun 2016 hanya berkembang 12,78%. Ini juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pengelola untuk melakukan kajian mendalam terhadap isu-isu seperti ini.

LKM UED-SP di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih terpaku pada pinjaman produktif dan pinjaman rumah tangga miskin saja. Perlu diberikan pemahaman bahwa sudah saatnya mengembangkan sayap usahanya sehingga mampu memperoleh laba yang maksimal. Pengendapan kas di rekening tidak mendatangkan hasil apa-apa. Secara ekonomi pengendapan dana justru akan berdampak pada rendahnya produktifitas dana yang dimiliki. Dengan modal yang ada sangat diharapkan bahwa LKM UED-SP sudah harus hijrah ke usaha-usaha lain sehingga berdampak terhadap sosial masyarakat lainnya seperti penyerapan tenaga kerja, kemudahan mengelola hasil perkebunan, peternakan dan sektor lainnya.

Produktifitas staff terhadap peminjam sampai dengan oktober 2016 rata rata mencapai 105 orang per staff. Dengan produktifitas volume pinjaman rata-rata sebesar Rp.1.344.881.683,- per staff. Indikasinya adalah setiap orang staff mampu melayani 105 orang dengan nilai pinjaman 1,3 miliar

Jika dibandingkan dengan pere-daran pinjaman produktifitas ini masih relatif rendah, bila dibandingkan dengan produktifitas karyawan multifinance yang ada di Indonesia mereka harus mampu menyalurkan kredit lebih dari satu miliar setiap bulanya atau setara dengan 12 miliar setiap tahunnya bahkan lebih. Dalam rangka meningkatkan kinerja atau produktifitas staff perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan terkait masalah usaha LKM dan strategi pemasaran lainnya.

Ditinjau dari sisi insentif staff yang diterima rata-rata sebesar Rp. 1.344.881.063,- dengan rasio Rp. 2.558.789,- per staff. Perihal insentif juga berdampak besar terhadap kinerja staff karena hal ini akan bermuara ke motivasi dan semangat kerja untuk itu pemberian stimulus berupa insentif diharapkan mampu mendongkrak kinerja pengelola.

### **Pencapaian Misi Sosial (Output Dan Outcome)**

Dari indikator pencapaian misi sosial (output dan outcome) dilihat dari jangkauan layanan menurut *gender* dan jangkauan nasabah.

Hingga oktober 2016 peminjam yang ada di LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis rata-rata 66,20% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 33,80 adalah kaum perempuan. Terjangkaunya peminjam perempuan menunjukkan bahwa LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis sangat peduli terhadap kaum wanita untuk mengembangkan usaha khususnya di wilayah

pedesaan. Rasio jumlah peminjam wanita setiap tahun mengalami kenaikan meskipun kenaikannya relatif sedikit. Tahun 2012 sebesar 30,98%, tahun 2013 sebesar 32,44%, tahun 2014 sebesar 33,39%, tahun 2015 sebesar 34,41% dan tahun 2016 sebesar 34,95%. Kondisi ini menggambarkan bahwa andil kaum perempuan dalam memanfaatkan pinjaman dari LKM UED-SP cukup tinggi. Ini juga berarti bahwa LKM UED-SP memberikan kesempatan yang besar untuk ikut berusaha dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Jangkauan layanan nasabah LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis mampu melayani 7 (tujuh) sektor usaha yakni; perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, dan jasa. Rasio rata-rata terbesar adalah sektor perkebunan yakni 51,96%, sektor perdagangan sebesar 30,77% dan sektor jasa sebesar 6,36%. Sementara sektor lainnya masih dibawah 5%. Terjangkaunya beberapa sektor dalam proses pembiayaan/kredit mengindikasikan bahwa LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis benar-benar serius dalam menjalankan misinya untuk dapat membantu dan mengembangkan usaha masyarakat desa di berbagai bidang. Dengan memberikan stimulus berupa kredit ringan diharapkan mampu merubah perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik.

### **Kesimpulan**

1. Kinerja sosial LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis dilihat dari sisi tujuan hingga tahun 2016 mampu mengembangkan jumlah pinjaman kumulatif maupun volume pinjaman tahun berjalan. Volume peminjam semua sektor juga berkembang setiap tahunnya. Volume pinjaman rumah tangga miskin juga berkembang namun per-

tumbuhannya tidak sampai 5% dari total kucuran dana pinjaman yang diberikan. Jumlah peminjam menurut *gender* berkembang dengan baik, peminjam laki-laki rata-rata 28.283 orang dan peminjam perempuan 14.517 orang.

2. Kinerja sosial LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis ditinjau dari aktivitas dan sistem internal terlihat bahwa perkembangan modal pemerintah rata-rata Rp.132.800.000.000,- setiap tahunnya sementara perkembangan modal dari laba tahun berjalan rata-rata Rp.8.036.051.139,- dengan rasio 93,72% dari pemerintah dan 6,28% dari laba tahun berjalan. Modal lainnya hingga saat ini belum ada. Perkembangan jumlah staff secara keseluruhan tetap karena adanya ketentuan dari owners yakni Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Namun perkembangan staff dari *gender* khususnya kaum perempuan rata-rata 204 orang tiap tahunnya. Perkembangan pinjaman usaha produktif rata-rata 57,72% dan perkembangan pinjaman rumah tangga miskin 32,79%. Produktifitas staff 105 orang per staff dengan volume pinjaman rata-rata Rp.1.344.881.683,-. Insentif staff rata-rata mencapai Rp. 1.173.720.029,- dengan rasio Rp. 2.558.789,- per staff.
3. Kinerja sosial LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis dilihat dari pencapaian misi sosial (output dan outcome) menunjukkan bahwa rasio peminjam laki-laki rata-rata sebesar 66,20% dan peminjam perempuan sebesar 33,80%. Jangkauan layanan dari beberapa sektor rata-rata rasio tertinggi adalah sektor perkebunan yakni 51,96%, sektor perdagangan sebesar 30,77% dan sektor jasa 6,28% sementara sektor lainnya dibawah 5%. Rasio rata-rata jumlah

peminjam rumah tangga miskin adalah 1,28%. Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis mampu menjangkau beberapa sektor usaha dan yang paling dominan adalah perkebunan karena wilayah bengkalis umumnya adalah untuk perkebunan. Selain itu banyak peminjam yang juga memiliki usaha ganda selain petani, nelayan dan lainnya mereka juga mengembangkan sektor perdagangan sehingga sektor ini juga memiliki rasio yang cukup besar.

#### Saran-saran

1. Dari sisi produk rumah tangga miskin masih relatif kecil baik dari segi volume pinjaman maupun jumlah peminjam, untuk itu perlu adanya program khusus dalam rangka meningkatkan produk ini sehingga misi sosial dalam membantu rumah tangga miskin bisa tercapai dengan baik.
2. Modal masih diatas 90% bersumber dari Pemerintah Daerah Bengkalis. Perlu adanya terobosan baru untuk mencari investor, tabungan masyarakat atau pinjaman lainnya sehingga ketercukupan modal bisa terpenuhi.
3. Terbatasnya produk yang dimiliki oleh LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis sehingga perlu adanya variasi usaha di berbagai sektor sehingga mampu melayani semua lini masyarakat

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amir Efendi Siregar dkk (2010), *UKM dan Ilusi Kesejahteraan*, Jurnal Sosial Demokrasi Vol 9 Juli-september 2010
- Angga Kurniawan Rasmi, Ahmad Rifai, Ermi Tety (2015). *Analisis*

*Kinerja Sosial Dan Kinerja Keuangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bina Sejahtera di Desa Sibabat Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*, Jom Faperta Vol.1 No. 2 Februari 2015

Ardito Bhinadi (2008) *memperkuat lembaga ekonomi mikro yang berkelanjutan*, <http://arditobhinadi.blogspot.co.id/2008/05/bagaimana-lembaga-keuangan-mikro.html>

Badan Pusat Statistik. (2012), *Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012*. CV.Faesah Putra Abadi.

Bambang Supeno dan Mujiono ,2015, *Pengaruh Modal Manusia dan Modal Pelanggan Terhadap Kinerja Bisnis Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Provinsi Riau)*". SNIT P3M Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2015

Gunawan Sumodiningrat, (2007), *Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah*. Artikel Tahun II no. 1 Jurnal Ekonomi Pertanian. [www.ekonomirakyat.go.id/co.id](http://www.ekonomirakyat.go.id/co.id).

Ika Retno Sari, Ahmad Rifai, Didi Muwardi (2014), *Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan*

- wan, Jom Faperta Vol.1 No. 2 Oktober 2014
- Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang *Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Desa* (PPD)
- Microfinance Information Exchange. (2009). *Social Performance Standards Report*. Dari [www.mixmarket.org](http://www.mixmarket.org). Diakses pada tanggal 30 September 2016.
- Mujiono dan Halim Dwi Putra (2013), *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kabupaten Bengkalis*, SNIT P3M Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2013
- Otoritas Jasa Keuangan (2016), *lembaga Keuangan Mikro*, <http://www.ojk.go.id/Files/box/LKM/faq-lkm.pdf> di akses 1 desember 2016
- Rudjito. (2005). “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan Studi Kasus: Bank Rakyat Indonesia*”. Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003
- Saparila Worokinasih (2011), *Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, JAMBSP Vol. 7 No. 2 – Pebruari 2011: 252 – 271
- Sri Hartini Rachmad (2009), *UMKM Indonesia Mengapa dan Bagaimana*, <http://www.majalahwk.com/artikel-artikel/info-usaha/196-edisi-majalah.html>, Diakses 18 April 2016
- Supriyanto (2006), *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006.
- Wijono, W. (200, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus)*. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Dpartemen Keuangan.